

Pengarusutamaan Pendidikan Perdamaian Berbasis Kearifan Lokal *Pela Gandong* Pasca Rekonsiliasi Konflik Ambon di Sekolah

Mainstreaming of Peace Education Based on Local Wisdom of Pela Gandong after the Reconciliation of the Ambon Conflict in the School

Anju Nofarof Hasudungan, Sariyatun, Hermanu Joebagio
Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta
anjunofarof@gmail.com; sariyatun@staff.uns.ac.id; dan
hermanu.joebagio@staff.uns.ac.id

DOI: <http://doi.org/10.31291/jlk.v17i2.664>

Received: April 2019; Accepted: Januari 2020; Published: Februari 2020

Abstract

The reconciliation of the Ambon Maluku conflict in 2002 is inseparable from the local wisdom of the Maluku people namely, pela gandong. When many parties find it difficult to find out how to end the conflict, pela gandong transforms into part of conflict resolution. However, peace conditions that are still vulnerable (peace vulnerabilities) allow conflict to occur again. Therefore, the achievement of conflict reconciliation must increase to the stage of peace education. The Maluku people define pela as a model of friendship, a system of brotherhood, or a system of fellowship that is developed between all indigenous people of two or more countries. Pela gandong local wisdom-based peace education has been implemented at SMPN 9 Ambon City and SMPN 4 Salahutu Liang Central Maluku District in the form of hot education pela education activities. This is different from the civil education model developed by the United Nations Children's Fund (UNICEF). Ambon Public Middle School 9 has a total of 1431 students with 99% Christians, while SMP Negeri 4 Salahutu Liang has 414 students with 100% Muslims. This study aims to reveal how the mainstreaming of peace education with the local wisdom model is implemented. The study was conducted in January 2018 at SMPN 9 Ambon. To get the answers of researchers, qualitative case study research methods

are used. Data collection through literature study, interview, and participatory observation methods. The results of the study revealed the mainstreaming of peace education with the local wisdom model of *Pela Gandong* can be well implemented and able to maintain peace (*keeping the peace*) in schools.

Keywords: Mainstreaming, Peace Education, *Pela Gandong*, Ambon Conflict Reconciliation, Schools.

Abstrak

Rekonsiliasi konflik Ambon Maluku tahun 2002 tidak terlepas dari kearifan lokal kepunyaan masyarakat Maluku yakni, *pela gandong*. Saat banyak pihak sulit menemukan bagaimana cara mengakhiri konflik, *pela gandong* bertransformasi menjadi bagian dari resolusi konflik. Akan tetapi, kondisi perdamaian yang masih rentan (*peace vulnerabilities*) memungkinkan konflik dapat terjadi lagi. Oleh karena itu, pencapaian rekonsiliasi konflik harus meningkat ke tahap pendidikan perdamaian (*peace education*). Masyarakat Maluku mendefinisikan *pela* sebagai model persahabatan, sistem persaudaraan, atau sistem persekutuan yang di kembangkan antar seluruh penduduk asli dari dua negeri atau lebih. Pendidikan perdamaian berbasis kearifan lokal *pela gandong* telah diimplementasi di SMPN 9 Kota Ambon dan SMPN 4 Salahutu Liang Kabupaten Maluku Tengah dalam bentuk kegiatan *panas pela* pendidikan. Hal ini berbeda dari model pendidikan perdamaian yang dikembangkan oleh *United Nations Children's Fund* (UNICEF). SMP Negeri 9 Ambon memiliki jumlah peserta didik 1431 jiwa dengan 99 % beragama Kristen, sedangkan SMP Negeri 4 Salahutu Liang memiliki jumlah peserta didik 414 jiwa dengan 100 % beragama Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana pengarusutamaan pendidikan perdamaian dengan model kearifan lokal terlaksana. Penelitian dilakukan pada Januari 2018 di SMPN 9 Ambon. Guna mendapatkan jawaban peneliti, dipergunakan metode penelitian kualitatif studi kasus. Pengumpulan data melalui metode studi kepustakaan, wawancara, dan observasi-partisipatoris. Hasil penelitian mengungkapkan pengarusutamaan pendidikan perdamaian dengan model kearifan lokal *pela gandong* dapat terlaksana dengan baik dan mampu memelihara perdamaian (*keeping the peace*) di sekolah.

Kata Kunci: Pengarusutamaan, Pendidikan Perdamaian, *Pela Gandong*, Rekonsiliasi Konflik Ambon, Sekolah.

Pendahuluan

Tercapainya rekonsiliasi konflik Ambon Maluku tahun 2002 tidak terlepas dari kearifan lokal (*local wisdom*) kepunyaan masyarakat Maluku yakni, *pela gandong* yang mampu menjadi

bagian dari resolusi konflik.¹ Hal tersebut demikian terjadi karena ada kesadaran kolektif (*collective memory*) masyarakat Ambon Maluku untuk segera mengakhiri konflik sipil terbesar di Indonesia. Usaha tersebut membuahkan hasil dengan dikembalikan fungsi dan tujuan kearifan lokal *pela gandong* di masa sebelum konflik terjadi sehingga menjadi bagian dari resolusi konflik Ambon Maluku. Dalam kasus ini ternyata dapat diketahui bahwa kearifan lokal masyarakat sejatinya mampu menjaga stabilitas dan harmonisasi kehidupan masyarakat secara alamiah. Kekuatan politik dan militer Orde Baru untuk mempertahankan stabilitas keamanan dan harmonisasi masyarakat hanya semu belaka. Buktinya, pasca Orde Baru berakhir terjadinya begitu banyak konflik sosial/agama, sebuah fenomena gunung es. Menurut George Junus Aditjondro, selama Orde Baru berkuasa telah menjadikan Suku, Agama, Ras, dan Antaretnis (SARA) sebagai mekanisme propaganda.²

Pencapaian rekonsiliasi tidak boleh berhenti, tetapi harus meningkat ke tahap pendidikan perdamaian (*peace education*).³ Lagi pula, daerah-daerah pasca konflik termasuk Ambon Maluku umumnya masih dalam kondisi perdamaian yang masih rentan (*peace vulnerabilities*) sehingga konflik mudah terjadi lagi. Tantangan dihadapi terutama bersumber dari masih adanya kesenjangan perdamaian (*peace gaps*), yaitu kesenjangan antara tujuan perdamaian ideal diharapkan dan realisasi perdamaian nyata dicapai di masyarakat.⁴ Untuk memastikan pembangunan perdamaian berlangsung secara berkelanjutan, dengan itu maka

¹Hendry Bakri, "Resolusi Konflik Melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong Di Kota Ambon," *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 1, No. 1 (2015): 51–60, <http://journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/view/133/pdf>.

²George Junus Aditjondro, *Ketika Semerbak Cengkih Tergusur Asap Mesiu, Tragedi Kemanusiaan Maluku Di Balik Konspirasi Militer, Kapitalis Birokrat, Dan Kepentingan Elit Politik* (Jakarta: Sekretariat Tapak Ambon., 2001).

³Birgit Bräuchler, "Cultural Solutions to Religious Conflicts? The Revival of Tradition in the Moluccas, Eastern Indonesia," *Asian Journal of Social Science* 37, no. 6 (2009): 872–891.

⁴Lambang Trijono, "Pembangunan Perdamaian Pasca-Konflik Di Indonesia: Kaitan Perdamaian, Pembangunan Dan Demokrasi Dalam Pengembangan Kelembagaan Pasca-Konflik," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 13 (2009): 48–70.

penting untuk dilakukan upaya-upaya mengatasi dan mengisi kesenjangan perdamaian (*fullfiling the peace gaps*) ini, baik pada level kebijakan maupun dalam praktik pembangunan perdamaian di tingkat komunitas. Masih rentan atau belum terkonsolidasinya perdamaian ini sewaktu-waktu bisa menyebabkan konflik kembali muncul di masyarakat. Oleh karena itu, selain memastikan agar perjanjian damai berjalan efektif, upaya pencegahan konflik agar konflik kekerasan tidak kembali muncul menjadi agenda penting dalam masa pasca-konflik. Pencegahan konflik di masa pasca-konflik pada esensinya sama dengan memelihara perdamaian (*keeping the peace*). Pengarusutamaan pendidikan perdamaian menjadi cara yang tepat untuk memelihara perdamaian, tidak terkecuali dibidang pendidikan.

Pengarusutamaan perdamaian merupakan suatu konsep yang dibangun untuk mengintegrasikan kebutuhan masyarakat akan keamanan dan situasi damai dalam kerangka program pembangunan. Istilah ini mulai digunakan dalam bidang pembangunan dan pemerintahan sebagai suatu strategi pengelolaan konflik dan penguatan perdamaian. Pengarusutamaan perdamaian dalam program pembangunan tentunya memberikan prespektif baru tentang bagaimana seluruh pemangku kepentingan dapat terlibat dalam memperkuat perdamaian dan kesejahteraan masyarakat secara terpadu. Setiap gagasan pembangunan yang diusung hendaknya telah melalui pertimbangan dan kajian yang komprehensif terhadap konteks dan kebutuhan masyarakat dalam upaya mencapai tujuan yang diharapkan. Pengarusutamaan perdamaian bukan sesuatu yang berdiri sendiri tetapi sebagai daya rekat dan silang gagasan (*crosscutting issues*) dari berbagai sektor atau pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur. Konsep pengarusutamaan menjadi pendorong bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk memahami lingkungan dan konteks dalam merumuskan kebijakan/program pembangunan. Hal ini menjadi sangat penting agar apapun kebijakan dan program yang dihasilkan melalui proses partisipatif, aspiratif dan teknokratis diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan kohesi sosial. Setiap program harus melalui proses analisis dan kajian mendalam agar tidak menimbulkan perselisihan dan konflik (struktural dan horizontal) dikemudian hari. Pada umumnya, pengarusutamaan pendidikan perdamaian dalam kurikulum sekolah menengah akan

membantu dalam pembangunan perdamaian di benak para siswa dan para guru dan administrator yang akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran dalam sistem. Perlu nya pengarusutamaan pendidikan perdamaian dalam kurikulum sekolah menengah adalah penting karena sekolah perlu untuk terus memulai budaya reformasi kurikuler sehingga memungkinkan berbagai pelaku dalam sistem sekolah dan masyarakat pada umumnya untuk menghadapi tantangan meningkatnya jalan untuk penggunaan kekerasan sebagai opsi untuk menanggapi masalah konflik.⁵

Guna memperkokoh pendidikan perdamaian, maka penyelenggaraan sistem pendidikan dapat mengadopsi semangat multikultural yang berakar pada nilai-nilai kearifan lokal. Pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal adalah pendidikan yang melindungi, menghargai, dan memelihara kearifan lokal untuk memperkuat identitas nasional dalam bangunan kemajemukan bangsa. Seperti halnya Pancasila yang digali dari kepribadian bangsa, semboyan *bhinneka tunggal ika* menjadi dasar historis bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang multikultural. Geneva Gay, memberikan sedikitnya lima argumen mengapa muatan budaya dan etnik itu sangat strategis dan penting untuk ditumbuhkan dalam kurikulum pendidikan, termasuk pendidikan damai dan resolusi konflik.⁶

Pertama, muatan budaya dan etnik dalam kurikulum pendidikan sangat krusial sekaligus esensial bagi perbaikan aspek pedagogis pengajar dalam mengajar. *Kedua*, karena kebanyakan sumber belajar di ruang kelas adalah *textbook*, memasukkan agenda budaya dan etnik ke dalam *textbook* merupakan keniscayaan karena hal itu akan mengubah gaya mengajar guru. *Ketiga*, berdasarkan riset secara simultan di beberapa lembaga pendidikan, muatan budaya dan etnik dalam kurikulum pendidikan memiliki arti yang banyak bagi para siswa sekaligus meningkatkan apresiasi siswa dalam belajar. *Keempat*, relevansi muatan budaya dan etnik dalam kurikulum juga menyumbang kelestarian

⁵Abdulkareem Jude, "International Journal of English and Education Mainstreaming Peace Education in Secondary School Curricula in Nigeria," *Modibbo Adama University of Technology, Nigeria*, No. 2 (2013).

⁶J. Carroll-Lind, "Responsive Schools," *Office of the childrens commissioner*, no. March (2010).

sejarah, budaya, dan tradisi sebuah etnis tertentu sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan apresiasi kebangsaan yang tinggi dan memunculkan kohesivitas dan toleransi. *Kelima*, biasanya muatan budaya dan etnik diambil dari berbagai sumber yang sangat kaya, bukan hanya dari buku tetapi juga dari pengalaman orang perseorangan, baik melalui wawancara maupun yang didokumentasikan dalam bentuk tayangan dan sebagainya. Artinya, sumber informasi yang sangat melimpah tentang budaya dan etnis di luar sekolah itu akan membantu baik guru maupun siswa dalam menciptakan kecintaan terhadap keragaman pola kehidupan.

Alasan yang melatarbelakangi pentingnya pendidikan perdamaian (*peace education*) adalah keberadaan masyarakat dengan individu-individu yang beragam latar belakang bahasa dan kebangsaan (*nationality*), suku (*race or ethnicity*), agama (*religion*), gender, dan kelas sosial (*social class*) yang sangat rentan akan konflik. Keragaman latar belakang individu dalam masyarakat tersebut berimplikasi pada keragaman latar belakang peserta didik dalam suatu lembaga pendidikan.⁷

Menurut Kester dalam Sariyatun bahwa pendidikan adalah perantara yang tepat untuk menumbuhkan berbagai sikap yang mendukung pencapaian perdamaian.⁸ Selain itu, pendidikan juga menjadi sarana yang efektif dan efisien untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal karena pendidikan secara praktis tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai budaya yang merupakan unsur identitas nasional. Pendidikan dan kebudayaan memiliki hubungan yang saling mendukung dan melengkapi satu sama lainnya. Kemendikbud lebih tegas lagi menyatakan bahwa tujuan dari pembelajaran akan dapat tercapai secara maksimal dengan adanya pendekatan budaya, adat, dan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Aktivis perdamaian Ambon Jacky Manuputty menyatakan “di bawah pemerintahan Soeharto, sekolah dianggap sebagai wahana paling efektif untuk menyebarluaskan sejarah versi pemerintah dan mempromosikan identitas bersama Indonesia. Bahwa, desentralisasi kurikulum sekolah dan masuk-

⁷James A. Banks (ed.), *Multicultural Education: Issues and Perspectives* (Boston-London: Allyn and Bacon Press, 1989).

⁸Hermanu Joebagio and Muhammad Akhyar, “Peace Education As the Development of Social Skill in Social Science Learning” 29, No. 2 (2019).

nya muatan lokal, serta komunikasi antarbudaya dan antaragama merupakan langkah penting menuju ketahanan perdamaian”.⁹

Kuenzi dalam Sariyatun menjelaskan, implementasi pendidikan perdamaian dapat dilihat dalam membangun pendidikan untuk masyarakat majemuk, membangun kesamaan dan kemandirian di antara siswa yang mendasari komunitas damai, mengajar siswa bagaimana berpartisipasi dalam politik damai.¹⁰ Pendidikan perdamaian berbasis kearifan lokal telah diimplementasi di SMPN 9 Kota Ambon dan SMPN 4 Salahutu Liang Kabupaten Maluku Tengah. Pengarusutamaan model pendidikan perdamaian yang berbeda dari model pendidikan perdamaian yang dikembangkan oleh *United Nations Children's Fund* (UNICEF) ini dimulai saat rekonsiliasi konflik Ambon telah tercapai pada 12 Februari 2002. *Japan International Cooperation Agency* (JICA) mendirikan *Community Empowerment Program Pendidikan Orang Bersaudara* (CEP-POB), yang menganggap orang Muslim dan Kristen sebagai saudara sendiri. Melibatkan 24 SMP dari Leihtu dan Baguala di Pulau Ambon pada tahun 2006 dan 2007. Selain itu, UNICEF dan UNDP meluncurkan program pendidikan perdamaian bernama Kurikulum Pendidikan Orang Bersaudara tahun 2006 dan Sekolah Rekonsiliasi mulai tahun 2004 sampai tahun 2005, juga di Pulau Ambon, sebagai upaya mengintegrasikan budaya perdamaian yang dibingkai dengan kekuatan tradisi lokal Maluku Tengah dalam proses belajar-mengajar serta peningkatan kesadaran tentang potensi yang terkandung dalam pluralisme beragama dan berbudaya.¹¹

Nilai perdamaian yang melekat dalam kearifan lokal *pela gandong* semakin dekat dikalangan peserta didik. Harapannya, konflik Ambon tidak diwariskan bahkan dapat mencegah konflik serupa di masa depan. Bahwa, konflik tidak hanya berpengaruh pada kelompok saja tetapi juga pada individu. Oleh karena itu, diperlukan pengarusutamaan pendidikan perdamaian untuk tetap

⁹Bräuchler, “Cultural Solutions to Religious Conflicts? The Revival of Tradition in the Moluccas, Eastern Indonesia.”

¹⁰Joebagio and Akhyar, “Peace Education As the Development of Social Skill in Social Science Learning.”

¹¹M.A. Amirrachman, “Peace Education in the Moluccas, Indonesia: Between Global Models and Local Interests,” *UvA-DARE (Digital Academic Repository)* (n.d.).

menjaga rekonsiliasi perdamaian yang akan diwariskan ke generasi selanjutnya. Jangan sampai kisah dari kisah Ronald Regang (Mantan Kombatan Pasukan Kristen yang saat itu usia 10 tahun) dan Iskandar Slamet (Pasukan Jihad Islam usia 15 tahun) yang ditayangkan pada 16 Agustus 2018 di acara Rosi TV Kompas episode kemerdekaan “Belajar Damai dari Maluku” terulang kembali.

Bahwa peserta didik di Maluku harus diajarkan nilai-nilai pendidikan perdamaian dengan pendekatan kearifan lokal. Karena itulah, inisiatif berbagai pihak (*stake holders*) dari SMPN 9 Ambon dan SMPN 4 Salahutu Liang Maluku untuk memulai era baru dengan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal *pela gandong* di sekolah sehingga menjadi pendidikan perdamaian. Tujuan utamanya ialah bagaimana peserta didik di kedua sekolah yang beda kepelemukan agama ini dapat belajar hidup bersama dan toleransi dengan pendekatan kearifan lokal. Peserta didik diharapkan tidak lagi mewarisi kebencian dan luka batin akibat konflik. Oleh karena itu, yang menjadi tanggungjawab selanjutnya setelah rekonsiliasi tercapai adalah menjaga perdamaian. Sebagaimana diungkapkan oleh Sariyatun bahwa menggali dan menanamkan kembali kearifan lokal secara inheren melalui pendidikan dapat dikatakan sebagai gerakan kembali pada basis nilai budaya, yang kegunaannya dapat berupa pembentuk identitas dan juga sebagai filter dalam menyeleksi pengaruh budaya lain.¹² Lebih lanjut dijelaskan bahwa sistem pendidikan yang terikat pada kearifan lokal dalam rangka pembentukan warga negara secara proaktif dapat menghadapi globalisasi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud memaparkan kajian empiris tentang pengarusutamaan pendidikan perdamaian (*peace education*) berbasis kearifan lokal *pela gandong* pasca rekonsiliasi konflik Ambon Maluku (kasus SMPN 9 Kota Ambon dan SMPN 4 Salahutu Liang Kabupaten Maluku Tengah). Tulisan ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus mencakup studi tentang suatu kasus dalam kehidupan nyata, dalam konteks atau setting kontem-

¹²Sariyatun, “Pengembangan Model Pendidikan Nilai-Nilai Budaya Di Smp Berbasis Tradisi Seni Batik Klasik Surakarta,” *Paramita: Historical Studies Journal* 23, No. 2 (2013).

porer.¹³ Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara observasi-partisipasi, kajian pustaka, wawancara, dan dokumentasi.

Prosedur pelaksanaan penelitian kualitatif studi kasus:¹⁴

- *Pertama*, para peneliti menentukan terlebih dahulu apakah pendekatan studi kasus sudah tepat untuk mempelajari masalah risetnya.
- *Kedua*, para peneliti perlu mengidentifikasi kasus atau beberapa kasus mereka. Kasus ini apakah melibatkan satu individu, beberapa individu, sebuah program, suatu peristiwa, atau suatu aktivitas.
- *Ketiga*, pengumpulan data meluas mengambil beragam sumber informasi. Seperti, cara observasi-partisipasi, kajian pustaka, wawancara, dan dokumentasi.
- *Keempat*, tipe analisis data ini berupa analisis holistik atau analisis melekat.
- *Kelima*, tahapan penafsiran, peneliti melaporkan makna dari kasus tersebut, apakah kasus instrumental atau kasus intrinsik.

Proses pengumpulan data penelitian ini disesuaikan dengan jenis penelitian. Data yang dihimpun dalam penelitian ini berupa kata-kata, tindakan dan dokumen, situasi dan peristiwa yang dapat diobservasi. Sumber data yang dimaksud adalah:¹⁵

1. Kata-kata diperoleh secara langsung atau tidak langsung melalui wawancara, dan observasi.
2. Dokumen berupa kurikulum, Satuan Pembelajaran, Rencana Pelajaran.
3. Situasi yang berhubungan dengan kegiatan subjek penelitian dan masalah penelitian seperti dalam proses belajar mengajar, situasi belajar di perpustakaan dan situasi di lingkungan sekolah.

Proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti, peneliti melakukan penggolongan data dalam pola, tema atau kategori, tanpa kategori atau klasifikasi data akan menimbulkan kekacauan.¹⁶ Pelaksanaan analisis data dilakukan sepanjang penelitian itu dan secara terus menerus dari mulai tahap pengumpulan data sampai akhir. Data yang diperoleh dari

¹³John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset Memilih Di Antara Lima Pendekatan*, Edisi ke-3. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018).

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Nasution, *Metode Research* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003).

¹⁶*Ibid.*

penelitian ini tidak akan memberikan makna yang berarti apabila tidak dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya menurut analisis data Model Interaktif dari Miles dan Huberman dalam Basrowi Suwandi terdapat tiga aktifitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display* dan *concluting drawing/verification*.¹⁷

Hasil dan Pembahasan

1. Pengarusutamaan Pendidikan Perdamaian

Pendidikan perdamaian (*Peace Education*) sesungguhnya pertama kali muncul pada abad ke-17 yang dicetuskan pertama kali oleh seorang akademisi Ceko, Comenius, yang secara universal menyebarkan paham bahwa dengan pengetahuan, akan memberikan jalan kepada perdamaian.¹⁸

Dewasa ini, pendidikan perdamaian telah menjadi gerakan global dengan melihat terlibatnya ratusan organisasi yang diwakili oleh ribuan orang dalam acara *International Peace Conference* di *The Hague*, Belanda.¹⁹ Dalam acara yang bernama *The Hague Appeal for Peace* yang mengusung tema perdamaian dunia tersebut, para peserta mencetuskan untuk mempromosikan penghentian segala peperangan dan menyebarkan budaya perdamaian. Konferensi internasional ini mengusung beberapa aspek dari olah raga hingga pendidikan sebagai salah satu upaya untuk mempromosikan budaya perdamaian. Dalam kaitannya dengan pendidikan *The Hague* telah membentuk *Global Peace Education Network* serta menggalakan *Global Campaign for Peace Education* guna mendukung aplikasi pendidikan perdamaian di seluruh dunia.

Peringatan Hari Perdamaian Internasional pada tanggal 21 September 2013, PBB secara khusus mengusung tema pendidikan perdamaian. Sekretaris Jenderal Ban Ki-Moon saat itu, melalui pesan perdamaiannya menyerukan untuk merupakan tugas seluruh lapisan masyarakat untuk mengajarkan generasi-generasi muda mengenai nilai-nilai toleransi dan menanamkan

¹⁷Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

¹⁸Ian Harris, "History of Peace Education," *Handbook on Peace Education*, last modified 2011, www.tc.edu/centers/epe/, 2008. (Diakses tanggal 20 Januari 2019 pukul 15.30).

¹⁹Gouri Sadhwani, "The Hague Appeal for Peace Conference," last modified 2000, www.mediate.com. (Diakses 20 Januari 2019 pukul 16.30).

perilaku yang saling menghormati.²⁰ Selain itu pada pidatonya, Sekretaris Jenderal Ban Ki-Moon mengajak peran serta seluruh warga internasional untuk berinvestasi di sekolah-sekolah dan pengajar untuk membangun dunia yang adil dan inklusif yang merangkul keragaman sehingga tercapai perdamaian dunia. Dengan melihat perhatian yang tertuju kepada pentingnya pendidikan yang mengusung tema perdamaian, menjadikan pendidikan perdamaian sebagai aspek yang sangat penting dan harus segera dilaksanakan dalam mencapai perdamaian secara menyeluruh.

Dalam level internasional, pendidikan sebagai pendekatan untuk mengurangi konflik sesungguhnya sudah menjadi wacana terutama pendidikan perdamaian. PBB melalui badan-badannya seperti UNESCO dan UNICEF sudah menggunakan pendidikan perdamaian sebagai respon kemanusiaan paska konflik untuk mengembalikan kondisi masyarakat paska konflik lebih berperilaku lebih kepada perdamaian. Pendidikan terutama pendidikan perdamaian juga dipercaya mempunyai kekuatan untuk mengikis dan menimalisir gerakan ekstrimisme yang sekarang ini merambah ke kaum pemuda dan pemudi yang tidak memiliki pendidikan yang cukup tentang toleransi dan saling menghormati. Fountain menguraikan konsepsi UNICEF tentang pendidikan perdamaian yang merupakan proses mempromosikan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai tentang perdamaian pada siswa.²¹

Di Indonesia, provinsi Aceh adalah daerah yang bergolak dan konflik pertama yang menerima dukungan dari UNICEF dalam bentuk pendidikan perdamaian pada Januari 2001. UNICEF juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pendidikan perdamaian di Maluku. Badan internasional lainnya adalah UNDP, yang didirikan pada tahun 1965 ketika Majelis Umum menggabungkan Program Bantuan Teknis (EPTA) yang Diperluas, dimulai di PBB oleh AS, dan Dana Khusus. UNDP membantu negara-negara berkembang untuk menarik dan memanfaatkan bantuan, apa yang diklaim sebagai cara yang efektif. UNDP, bersama dengan organisasi saudaranya, *Peace Through Development* (PTD) juga

²⁰Rhesa Ivan Lorca, “Hari Perdamaian Internasional, PBB Serukan Investasi Dalam Pendidikan Perdamaian,” last modified 2013, www.pedomannnews.com/2013. (Diakses 19 Januari 2019 pukul 20.00).

²¹Susan Fountain, “Peace Education in UNICEF, UNICEF,” www.unicef.org/ 1999. (Diakses 22 Januari 2019 pukul 21.00).

berperan dalam pengembangan konflik di Maluku, dan kali ini mengalihkan perhatiannya ke sektor pendidikan.

Gabriel Solomon, sebagaimana dikutip oleh H.B. Danesh menyimpulkan bahwa aktivitas pendidikan damai saat ini berada dalam empat kategori:²²

1. Pendidikan damai semata-mata sebagai ‘aktivitas perubahan mindset’;
2. Pendidikan damai semata-mata sebagai ‘penanaman seperangkat kecakapan atau skill’;
3. Pendidikan damai sebagai ‘promosi hak asasi manusia (khususnya di negara-negara dunia ketiga), dan
4. Pendidikan damai sebagai aktivitas pengelolaan lingkungan hidup, pelucutan senjata dan promosi budaya damai.

Sedangkan menurut Sandy Ascenso Carreira, et al, kesimpulan penting untuk pengarusutamaan pendidikan perdamaian yakni:²³

1. Tempat yang baik untuk memulai adalah dengan kompetensi staf organisasi masyarakat sipil.
2. Konteks organisasi internal di mana staf beroperasi harus dipertimbangkan dan perlu dianalisis.
3. Sinergi dengan kemitraan dan jaringan yang sudah ada harus diidentifikasi dan dimanfaatkan.
4. Potensi kerja sama dengan para pemangku kepentingan yang bekerja di bidang pendidikan perdamaian yang sama harus dinilai untuk peluang pembelajaran bersama dan untuk meningkatkan jangkauan.
5. Hubungan dengan para pemangku kepentingan yang bekerja di bidang-bidang lain pendidikan perdamaian harus dibangun untuk mengidentifikasi manfaat bersama dan potensi sinergi.
6. Kemungkinan bekerja dengan organisasi yang saat ini tidak aktif dalam pendidikan perdamaian seperti sektor swasta, pemerintah dan organisasi masyarakat sipil lainnya harus diteliti.

Mengarusutamakan pendidikan perdamaian dapat membantu individu dan organisasi yang aktif dalam pendidikan perdamaian mengembangkan pendekatan pendidikan yang koheren yang mendorong Kedamaian Sejati. Tujuan pengarusutamaan pendidikan perdamaian adalah untuk mengarusutamakan perdamaian di dalam

²²H. B. Danesh, “Towards an Integrative Theory of Peace Education,” *Journal of Peace Education* 3, no. 1 (2006): 55–78.

²³Sandy Ascenso Carreira et al., “Mainstreaming Peace Education” (2014): 114.

individu, dalam interaksi interpersonal dan antarkelompok dan dalam konteks dunia yang kompleks. Ini adalah tentang mengakui bahwa mendidik orang tentang perdamaian dan menuju perdamaian adalah proses yang terkait dengan interaksi dan usaha kita sehari-hari.²⁴

Membangun praktik pengarusutamaan gender dan mempertimbangkan konteks kerja organisasi masyarakat sipil yang bekerja di bidang pendidikan perdamaian, pemahaman untuk pengarusutamaan pendidikan perdamaian dapat dikembangkan. Seperti disebutkan sebelumnya, pendidikan perdamaian adalah proses holistik, multidisiplin dan transformatif yang mengembangkan kompetensi untuk tujuan berkontribusi pada transformasi konflik non-kekerasan, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan partisipasi aktif.

Pendidikan perdamaian dibutuhkan tidak hanya dalam konflik kekerasan atau masyarakat pascaperang tetapi dalam semua konteks. Pendidikan perdamaian melintasi lintas disiplin, dengan perhatian pada nir-kekerasan, hak asasi manusia, dan partisipasi sebagai bagian integral dari berbagai prakarsa dan program. Ini diarahkan untuk membangun Kedamaian Sejati sebagai persimpangan kedamaian batin, kedamaian sosial dan kedamaian lingkungan. Setiap pendekatan untuk mengarusutamakan pendidikan perdamaian harus mempertimbangkan tiga dimensi Kedamaian Sejati ini. Strategi untuk pengarusutamaan pendidikan perdamaian harus fokus pada pengembangan kompetensi individu dan harus bertujuan untuk menerjemahkan gagasan perdamaian ke dalam tindakan dalam tiga dimensi ini.

Terhadap latar belakang ini, pengarusutamaan pendidikan perdamaian memiliki dua tujuan:²⁵

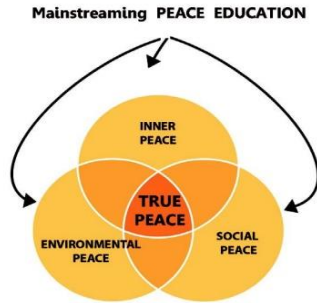
1. Mengembangkan pemahaman dan kesadaran yang koheren tentang apa itu pendidikan perdamaian, sehingga mereka yang bekerja di sektor ini berkenalan dengan beragam tema dan metode pendidikan perdamaian dan dapat bekerja secara koheren dalam pengarusutamaan perdamaian.
2. Meningkatkan Kedamaian Sejati dengan memastikan bahwa berbagai individu berpartisipasi dalam proyek atau program pendidikan perdamaian di beberapa titik dalam kehidupan.

Pemahaman pengarusutamaan pendidikan perdamaian harus dipersempit dari gagasan umum menjadi instrumen yang meng-

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid.*

integrasikan pembelajaran tentang dan untuk perdamaian ke dalam proses pendidikan.²⁶ Dengan demikian, pengarusutamaan pendidikan perdamaian di bidang pendidikan orang dewasa non-formal adalah instrumen untuk membuat pendidikan perdamaian menjadi umum, normal dan diterima secara luas untuk mengarusutamakan perdamaian pada tingkat individu, masyarakat dan lingkungan (lihat gambar di bawah).



Gambar 1: Mengarusutamakan pendidikan perdamaian dan kedamaian sejati.²⁷

Oleh karena itu, untuk mengarusutamakan pendidikan perdamaian dan untuk melayani tujuan negara, strategi pengarusutamaan memiliki dua tahap strategis:

1. Kontekstualisasi internal dan eksternal dari lingkungan kerja
2. Kerja sama aktif dengan pemangku kepentingan lain dalam bidang pendidikan perdamaian dan / atau lintas sektor untuk menciptakan agen perubahan.



Gambar 2: Dua tahap strategi untuk pengarusutamaan pendidikan perdamaian²⁸

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

Menerapkan dua tahap strategis ini membantu pengembangan pemahaman yang lebih luas tentang perdamaian di dalam individu yang ditargetkan, yang menerapkan prinsip-prinsip Budaya Damai dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka, membuatnya lebih mudah untuk menjangkau individu, kelompok, dan lembaga baru melalui pendidikan perdamaian.

Kedua tahap ini mengembangkan potensi penuh mereka ketika hal-hal berikut ini dipertimbangkan selama realisasinya:

1. Pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dari anggota staf organisasi masyarakat sipil dan pelajar yang terlibat dalam proyek dan program pendidikan perdamaian.
2. Visibilitas tinggi dan komunikasi eksplisit dari konsep-konsep utama perdamaian dan pendidikan perdamaian selama pertemuan pendidikan.

Karena keterkaitan dan kaitan erat antara pengarusutamaan pendidikan perdamaian dan pengarusutamaan perdamaian, hasil dari pengarusutamaan pendidikan perdamaian adalah untuk menyebarkan pendidikan perdamaian dan perdamaian secara umum.

2. Pendidikan Perdamaian dalam *Pela Gandong*

Masyarakat Maluku mendefinisikan *Pela* sebagai model persahabatan atau sistem persaudaraan, atau sistem persekutuan yang di kembangkan antar seluruh penduduk asli dari dua negeri atau lebih. Ikatan sistem tersebut telah di tetapkan oleh leluhur dalam keadaan khusus dengan hak-hak dan kewajiban tertentu yang di setuju bersama. Bartles melihat *pela* sebagai kesepakatan perjanjian sebuah sistem sosial yang terjadi tanpa mempertimbangkan aspek lain. Yang terpenting adalah perasudaraan yang telah di ikat. Pengertian-pengertian di atas memposisikan saudara *pela* pada struktur sosial yang paling tinggi dan terhormat melebihi hubungan saudara kandung yang bersifat biologis. Pertama kali *pela gandong* dihidupan kembali dalam usaha merevitalisasikan dihadirkan dalam bentuk lomba perahu tradisional (lomba arumbai mangurrebe), yang dihidupkan kembali pada tahun 2005. Keunggulan budaya *pela* dan *gandong* di Maluku di lihat bukan pada porsi wilayah administrasi semata namun makna esensi dari *pela* dan *gandong* itu sendiri. *Pela* dan *gandong* memiliki keunggulan kebudayaan yang di sebutkan ada

juga sebagai budaya rukun atau damai yang berasas kekerabatan dalam konsep kearifan lokal yang murni muncul dan digagas dari kecerdasan leluhur orang Maluku.

M. G. Ohorella dalam Birgit Brauchler misalnya, menunjukkan bahwa *pela* harus disesuaikan dengan keadaan modern.²⁹ Untuk mencakup seluruh masyarakat Maluku, sistem *pela* harus diperluas untuk mengintegrasikan lebih banyak desa dan harus dipindahkan ke tingkat yang lebih tinggi, untuk menciptakan pakta antar kabupaten, sehingga secara otomatis mengintegrasikan semua desa di Maluku. Dengan cara ini, Ohorella berharap, nilai-nilai *pela* persaudaraan dan saling membantu pada saat krisis dapat ditransfer ke semua aspek masyarakat Maluku: sosial, budaya, pendidikan, agama, ekonomi, politik, pemerintahan dan sektor keamanan. Sembilan tahun setelah ia menulis naskah ini, masih belum ada tanda-tanda bahwa sesuatu seperti *pela* yang menyeluruh dan mencakup semuanya akan berevolusi.

Nilai-nilai pendidikan perdamaian (*peace education*) dalam *pela gandong*:

1. Konsep; *hidup orang Basudara, Potong di kuku rasa di daging, Ale Rasa Beta Rasa, Sagu Salempeng di pata dua, Ain ne ain, Kalwedo, Kidabela, Sitakaka walike* dan lain sebagainya adalah konten lokal yang di kemas dalam tradisi harmonisasi orang basudara di Maluku.
2. *Pela* dan *gandong* telah menjadi pranata sosial yang berkembang sebagai suatu perekat hubungan sosial di antara satu negeri dan negeri lain baik yang beragama Islam maupun negeri yang beragama Kristen.
3. *Pela* dan *gandong* sangat berfungsi dalam mengatur sistem interaksi sosial masyarakat adat yang melampaui berbagai bidang.
4. *Pela gandong* sebagai model persahabatan atau sistem persaudaraan, atau sistem persekutuan yang dikembangkan antar seluruh penduduk asli dari dua negeri atau lebih. Ikatan sistem tersebut telah ditetapkan oleh leluhur dalam keadaan khusus dengan hak-hak dan kewajiban tertentu yang disetujui bersama.

²⁹Brauchler, "Cultural Solutions to Religious Conflicts? The Revival of Tradition in the Moluccas, Eastern Indonesia."

Setelah rekonsiliasi konflik Ambon tercapai, *pela gandong* berkembang di ranah baru yang sebelumnya belum terjangkau, yakni bidang pendidikan, *pela gandong* bertransmisi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM), kedua universitas beda ideologi agama ini mengangkat sumpah bersaudara dalam dunia pendidikan. Pada tahun 2018 giliran SMPN 9 Ambon dan SMPN 4 Salahutu, Liang, yang menggelar Panas *Pela*, yang bertempat di lokasi SMPN 9 Ambon yang merupakan objek penelitian penulisan penulis. Tujuannya adalah bagaimana nilai multikultural *pela gandong* dalam diterapkan di bidang pendidikan.

Menurut Paul Lederach misalnya, sumber daya terbesar untuk mempertahankan perdamaian dalam jangka panjang selalu berakar pada penduduk setempat dan budaya mereka.³⁰ Penelitian tentang kultur damai berbasis tradisi *pela* juga menunjukkan bahwa tradisi *pela* mengandung dimensi kolektivisme seperti yang diungkapkan oleh Geert Hofstede dibandingkan individualisme.³¹ Keunggulan budaya *pela* dan *gandong* di Maluku dilihat bukan pada porsi wilayah administrasi semata namun makna esensi dari *pela* dan *gandong* itu sendiri. *Pela* dan *gandong* memiliki keunggulan kebudayaan yang di sebutkan ada juga sebagai budaya rukun atau damai yang berasas kekerabatan dalam konsep kearifan lokal yang murni muncul dan digagas dari kecerdasan leluhur orang Maluku.

3. Pengarusutamaan Pendidikan Perdamaian Berbasis Kearifan Lokal *Pela Gandong* di Sekolah

Pada 25-30 Januari 2018, lembaga UNDP bersama lembaga nasional dan lokal Maluku seperti Convey Indonesia, PPIM UIN Jakarta, dan ARMC IAIN Ambon mengadakan kegiatan *Interfaith Youth Camp* 2018 di Ambon Maluku. Penulis turut menjadi pesertanya. Satu di antara agendanya, pada 29 Januari 2018, yakni, melihat bagaimana dua sekolah yang mewakili kelompok agama

³⁰John Paul Lederach, *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies* (Library of British Council: Liverpool, 1999).

³¹Geert Hofstede & Gert Jan Hofstede, *Culture and Organizations Software of the Mind* (McGraw-Hill, 2005).

saat konflik Ambon terjadi mengadakan ikatan persaudaraan yang disebut *panas pela*.



Gambar 3: Acara *Panas Pela* Pendidikan di SMPN 9 Ambon dan SMPN 4 Salahutu Liang, pada 29 Januari 2018. Sumber: Dokumentasi Pribadi

Dalam kegiatan itu penulis hadir sebagai peserta undangan untuk memotret bagaimana proses pengarusutamaan pendidikan perdamaian berbasis kearifan lokal *pela gandong*, turut hadir Gubernur Maluku saat itu, Said Assagaf. *Panas pela* dalam sebuah ikatan persaudaraan dibidang pendidikan dianggap sebagai nilai penting dan strategi pembangunan nilai karakter bagi generasi muda.

Dalam wawancaranya Gubernur Maluku saat itu, Assagaf mengatakan:

Tidak dapat diungkiri perkembangan zaman yang semakin modern sering membawa kecenderungan dan melupakan nilai-nilai budaya, adat istiadat daerah yang diwariskan nenek moyang kita sejak dulu. Budaya Pela adalah salah satu sistem sosial yang merupakan ikatan sosial dua negeri atau sumpah janji yang diikat leluhur kita untuk menjaga tali persaudaraan satu dengan yang lain. Lanjutnya, dengan adanya panas Pela Pendidikan dari dua sekolah ini akan menjadi suatu contoh untuk dapat di tiru dari sekolah dan lembaga pendidikan lainnya dalam rangka meningkatkan hubungan toleransi serta dapat mengimplementasikan dalam budaya. Diharapkan dari panas Pela pendidikan ini dapat memberikan nilai positif pada mutu pendidikan yang berkualitas bagi anak didik kita pada kedua lembaga ini (Wawancara, 29 Januari 2018)

Kegiatan *panas pela* pendidikan bertujuan semakin memperkuat hubungan persaudaraan dikalangan para siswa antarkedua sekolah tersebut yang berlatar belakang mayoritas bergama Islam

dan Kristen. SMP Negeri 9 Ambon memiliki jumlah peserta didik 1431 jiwa dengan 99 % beragama Kristen, sedangkan SMP Negeri 4 Salahutu memiliki jumlah peserta didik 414 jiwa dengan 100 % beragama Islam. Berbagai atraksi budaya ditampilkan peserta didik kedua sekolah baik lewat tari, lagu dan puisi, yang semuanya mengarah dan mengajak peserta didik satu dengan yang lain untuk hidup saling menyayangi walaupun berbeda agama suku dan golongan. Hubungan *pela* antar kedua sekolah ini telah terbangun beberapa tahun lalu dengan menjalankan sejumlah kegiatan bersama diantaranya, lomba pekan olah raga dan seni (Porseni), Pramuka, buka puasa bersama, natal bersama, kegiatan OSIS bersama sampai pada pertukaran guru mengajar kedua sekolah tersebut.



Gambar 5:
SMPN 9 Kota Ambon dan
SMPN 4 Salahutu Liang
melaksanakan *Panas Pela*
Pendidikan.
(Dokumentasi Pribadi)

Perwujudan pengarusutamaan pendidikan perdamaian berbasis kearifan lokal *pela gandong* di sekolah sebagai berikut:

- a. Transformasi nilai-nilai *pela* terus dilakukan, satu diantaranya adalah angkat *pela* pendidikan sebagaimana *pela* pendidikan SMPN 9 Kota Ambon yang 99% peserta didik dan gurunya beragama Kristen, dengan SMPN 4 Salahutu Liang yang 100% peserta didik dan gurunya beragama Islam.
- b. Pertukaran guru agama.
- c. Hubungan baik antar peserta didik dan guru di kedua sekolah berjalan harmonis dan makin rukun. Hampir tiap tahun, kedua sekolah ini melakukan 'reuni' yang dalam istilah adat disebut *panas pela*. Adapun panas pela ditandai dengan makan sirih pinang oleh Kepala SMPN 9 Ambon E. Harmusial didampingi Ketua OSIS Jack Dea bersama Kepala SMPN 4 Salahutu Hilia Pary dan Ketua OSIS Dimara Dinasti Laga.

d. Selain *panas pela*, sering membuat kegiatan bersama bagi para siswa



Gambar 6: Konsep Pengarusutamaan Pendidikan Perdamaian Berbasis Kearifan Lokal Pela Gandong Pasca Rekonsiliasi Konflik Ambon Maluku. Sumber: Olahan penulis.

Penutup

Rekonsiliasi konflik Ambon Maluku tahun 2002 tidak terlepas dari kearifan lokal kepunyaan masyarakat Maluku yakni *pela gandong* yang mampu menjadi bagian dari resolusi konflik. Pencapaian rekonsiliasi tidak boleh berhenti, tetapi harus meningkat ke tahap pendidikan perdamaian. Pengarusutamaan pendidikan perdamaian berbasis kearifan lokal dalam bentuk kegiatan *panas pela* pendidikan di SMPN 9 Kota Ambon dan SMPN 4 Salahutu Liang bertujuan semakin mempererat hubungan persaudaraan dikalangan peserta didik antar kedua sekolah yang berbeda kepelemukan agama. SMPN Kota 9 Ambon memiliki jumlah peserta didik 1431 jiwa dengan 99% beragama Kristen, sedangkan SMPN 4 Salahutu memiliki jumlah peserta didik 414 jiwa dengan 100% beragama Islam.

Bentuk pengarusutamaan pendidikan perdamaian berbasis kearifan lokal *pela gandong* yakni, dengan berbagai atraksi budaya yang ditampilkan peserta didik kedua sekolah baik lewat tari, lagu dan puisi, yang semuanya mengarah dan mengajak para siswa satu dengan yang lain untuk hidup saling menyayangi walaupun berbeda agama suku dan golongan. Hubungan *pela*

antar kedua sekolah ini telah terbangun beberapa tahun lalu dengan menjalankan sejumlah kegiatan bersama diantaranya, lomba pekan olah raga dan seni (Porseni), Pramuka, buka puasa bersama, natal bersama, kegiatan OSIS bersama sampai pada pertukaran guru mengajar kedua sekolah tersebut. Dengan demikian, pendidikan perdamaian yang mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal seperti *pela gandong* kepunyaan masyarakat Maluku telah mampu menjadi model pendidikan perdamaian yang berbeda dengan yang dikembangkan oleh UNICEF. Dan tentunya dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan pendidikan perdamaian itu sendiri. []

Daftar Pustaka

- Aditjondro, George Junus. *Ketika Semerbak Cengkih Tergusur Asap Mesiu, Tragedi Kemanusiaan Maluku Di Balik Konspirasi Militer, Kapitalis Birokrat, Dan Kepentingan Elit Politik*. Jakarta: Sekretariat Tapak Ambon., 2001.
- Amirrachman, M.A. "Peace Education in the Moluccas , Indonesia : Between Global Models and Local Interests." *UvA-DARE (Digital Academic Repository)* (n.d.).
- Bakri, Hendry. "Resolusi Konflik Melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong Di Kota Ambon." *The POLITICS : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 1, No. 1 (2015): 51–60. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/view/133/pdf>.
- Basrowi & Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bräuchler, Birgit. "Cultural Solutions to Religious Conflicts? The Revival of Tradition in the Moluccas, Eastern Indonesia." *Asian Journal of Social Science* 37, No. 6 (2009): 872–891.
- Carreira, Sandy Ascenso, Tiphaine Coulardeau, Elisenda González, Elif Kalan, Gracia Romeral Ortiz Quintilla, Sebastian Schweitzer, Imre Veeneman, and Meghann Aurea Villanueva. "Mainstreaming Peace Education" (2014): 114.
- Carroll-Lind, J. "Responsive Schools." *Office of the childrens commissioner*, No. March (2010).
- Danesh, H. B. "Towards an Integrative Theory of Peace Education." *Journal of Peace Education* 3, No. 1 (2006): 55–78.

- Geert Hofstede & Gert Jan Hofstede. *Culture and Organizations Software of the Mind*. McGraw-Hill, 2005.
- Harris, Ian. "History of Peace Education." *Handbook on Peace Education*. Last modified 2011. www.tc.edu/centers/epe/,2008.
- James A. Banks (ed.). *Multicultural Education: Issues and Perspectives*. Boston-London: Allyn and Bacon Press, 1989.
- Joebagio, Hermanu, and Muhammad Akhyar. "Peace Education As the Development of Social Skill in Social Science Learning" 29, No. 2 (2019).
- John W. Creswell. *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset Memilih Di Antara Lima Pendekatan*. Edisi ke-3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Jude, Abdulkareem. "International Journal of English and Education Mainstreaming Peace Education in Secondary School Curricula in Nigeria." *Modibbo Adama University of Technology, Nigeria*, no. 2 (2013).
- Lederach, John Paul. *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. Library of British Council: Liverpool, 1999.
- Nasution. *Metode Research*. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003.
- Rhesa Ivan Lorca, "Hari Perdamaian Internasional, PBB Serukan Investasi Dalam Pendidikan Perdamaian." Last modified 2013. www.pedomannews.com/2013.
- Sadhwani, Gouri, "The Hague Appeal for Peace Conference." Last modified 2000. www.mediate.com.
- Sariyatun, "Pengembangan Model Pendidikan Nilai-Nilai Budaya Di Smp Berbasis Tradisi Seni Batik Klasik Surakarta." *Paramita: Historical Studies Journal* 23, No. 2 (2013).
- Susan Fountain. "Peace Education in UNICEF, UNICEF." www.unicef.org/ 1999.
- Trijono, Lambang, "Pembangunan Perdamaian Pasca-Konflik Di Indonesia : Kaitan Perdamaian, Pembangunan Dan Demokrasi Dalam Pengembangan Kelembagaan Pasca-Konflik." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 13 (2009): 48–70.